



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT DANAREKSA (PERSERO)

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHRISTOPHORUS DEDY SETIAWAN SOEMIJANTORO

2. Jabatan : **DIREKTUR INVESTASI** 

3. NHK : **865384** 

#### II. DATA HARTA

## A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 41.072.918.030

- Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/238 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.002.689.000
- Tanah Seluas 2955 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1245 m2/500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 6.695.229.030
- Tanah dan Bangunan Seluas 815 m2/572 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000.000
- 5. Tanah dan Bangunan Seluas 497 m2/475 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/400 m2 di KAB / KOTA
  SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
- 8. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/125 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

### B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 560.000.000

 MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000





- MOTOR, HARLEY DAVIDSON FLHTCUI Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
- MOBIL, MERCEDES BENZ 280 S Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.125.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.783.215.861
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.063.000.000
Sub Total	Rp.	51.604.133.891
III. HUTANG	Rp.	al al
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	51.604.133.891

## Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.